



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PENGELUARAN KAS TERHADAP
PERJALANAN DINAS JABATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Nurul Rossa Bayuputri

1902043007

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI

JAKARTA

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PENGELUARAN KAS TERHADAP
PERJALANAN DINAS JABATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Nurul Rossa Bayuputri

1902043007

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli

Madya (A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI

JAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Prosedur Pengeluaran Kas Terhadap Perjalanan

Dinas Jabatan di BKKBN

Nama : Nurul Rossa Bayuputri

NIM : 1902043007

Program Studi : D3 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 22 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Akuntansi

Dosen Pembimbing,

Arif Widodo Nugroho S.E., M.M

Arif Widodo Nugroho S.E., M.M

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul :

**PROSEDUR PENGELUARAN KAS TERHADAP PERJALANAN DINAS
JABATAN DI BKKBN**

oleh :

NURUL ROSSA BAYUPUTRI
1902043007

telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi
Program Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal: 29 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua merangkap anggota :



(Herwin Kurniawan, S.E., M.M)

anggota :



(Arif Widodo Nugroho, S.E.,M.M)

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Arif Widodo Nugroho, S.E.,M.M



DR. Zulpahmi, S.E., M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pengeluaran Kas Terhadap Perjalanan Dinas Jabatan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”** merupakan hasil karya pribadi dengan keyakinan dan pengetahuan, saya tidak mencantumkan hasil karya orang lain atau bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya yang diajukan untuk gelar maupun ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA

Jakarta, Juli 2022

Yang Menyatakan,



Nurul Rossa Bayuputri

1902043007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat schat, nikmat iman, dan nikmat islam, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini. Serta penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang selalu mendampingi penulis dalam dukungan, semangat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan sesuai.

Laporan tugas akhir merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi dalam mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. DR. HAMKA. Laporan yang berjudul "Prosedur Pengeluaran Kas Terhadap Perjalanan Dinas di BKKBN"

Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan, semangat, dan do'a selama melaksanakan kegiatan pengamatan hingga penyusunan laporan tugas akhir.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

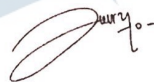
1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

4. Bapak M. Nurasyidin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak DR. Tohirin, SHI., M.P.D.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Arif Widodo Nugroho S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Sekaligus Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disampaikan oleh penulis secara lengkap yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Laporan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari segi tata bahasa, kalimat, dan permasalahan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima semua saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun untuk perbaikan Laporan tugas akhir ini.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 10 Juli 2022



Nurul Rossa Bayuputri
NIM : 1902043007

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	4
1.2.2 Pembatasan Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian Prosedur.....	8
2.1.2 Pengertian Sektor Publik.....	8
2.1.3 Pengertian Pengeluaran Kas.....	9
2.1.4 Jenis Pengeluaran Kas.....	10
2.1.5 Pengertian Perjalanan Dinas.....	13
2.1.6 Metode Pembayaran.....	13
2.1.7 Klasifikasi Pembayaran Metode Langsung.....	14
2.1.8 Klasifikasi Pembayaran Metode Uang Persediaan.....	14

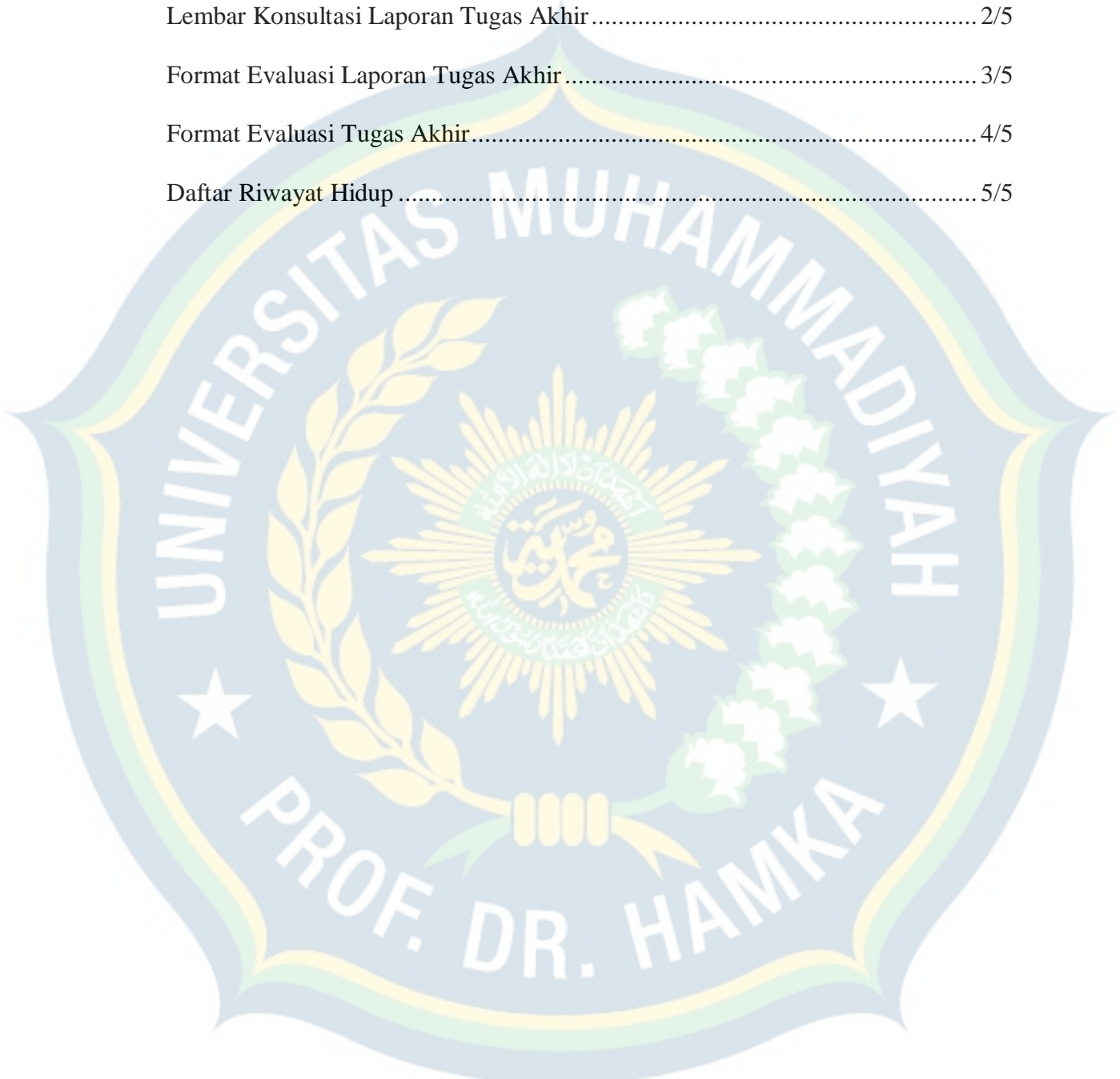
BAB III.....	16
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
3.1 Sejarah Perusahaan.....	16
3.1.1 Sejarah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	16
3.1.2 Profil Perusahaan.....	18
3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	19
3.1.4 Struktur Organisasi.....	20
3.1.5 Layanan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	21
3.2 Pembahasan.....	22
3.2.1 Standar Biaya Untuk Perjalanan Dinas Jabatan di BKKBN.....	22
3.2.2 Prosedur Pembayaran Dengan Metode Langsung dan Uang Persediaan.....	25
3.2.3 Dokumen Pengadaan Untuk Perjalanan Dinas di BKKBN.....	32
BAB IV.....	45
PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BKKBN.....	20
Gambar 2 Struktur Organisasi BKKBN Direktorat KIE	21
Gambar 3 Flowchart Pembayaran Metode Langsung.....	25
Gambar 4 Flowchart Pembayaran Metode Uang Persediaan.....	27
Gambar 5 Surat Tugas Perjalanan Dinas	30
Gambar 6 Rincian Biaya Perjalanan Dinas	31
Gambar 7 Harga Perkiraan Sendiri.....	32
Gambar 8 Undangan Perusahaan.....	34
Gambar 9 Berita Acara Pembuka Penawaran	35
Gambar 10 Berita Acara Evaluasi Penawaran.....	36
Gambar 11 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.....	37
Gambar 12 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	38
Gambar 13 Surat Perintah Kerja.....	39
Gambar 14 Surat Perintah Mulai Kerja.....	40
Gambar 15 Berita Acara Serah Terima.....	41
Gambar 16 Berita Acara Pembayaran.....	42
Gambar 17 Kuitansi.....	43
Gambar 18 Faktur Pajak	44

DAFTAR LAMPIRAN

Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/5
Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/5
Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/5
Format Evaluasi Tugas Akhir	4/5
Daftar Riwayat Hidup	5/5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemerintah Non Kementerian merupakan Lembaga Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugasnya di bawah perintah Presiden secara langsung. Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tanggungjawab terhadap Presiden melalui Kementerian seperti Badan Intelijen Negara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Kepegawaian Negara, dan sebagainya. Undang-Undang menjadi dasar hukum bagi Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dalam melaksanakan program-programnya, pemerintah memiliki sejumlah anggaran yang harus dikelola. Pengelolaan anggaran tersebut menjadi tanggung jawab bagi lembaga yang melaksanakan program pemerintah. Satuan kerja melakukan proses akuntansi untuk mengelola anggaran lembaga tersebut yang dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Sumber anggarannya yaitu berasal dari dana APBN.

Menurut Mahfudin (2018) penganggaran berbasis kinerja memberikan kejelasan tentang transparansi antara alokasi anggaran dan hubungan dengan kegiatan atau hasil dari program yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas penggunaan anggaran yang terukur.

Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki program yang saat ini harus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yaitu terkait *Stunting*. *Stunting* atau lambat pertumbuhan memiliki angka yang cukup tinggi di Indonesia. Masyarakat Indonesia banyak menyalahartikan bahwa *Stunting* adalah penyakit keturunan, persepsi tersebut tentunya dapat menimbulkan masalah yang serius. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan upaya yang lebih banyak dalam mengatasi hal tersebut (Aryastami, 2017).

Dalam melaksanakan programnya tentunya memiliki pengeluaran kas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengeluaran kas untuk mengedukasi masyarakat terkait *Stunting* salah satunya adalah Perjalanan Dinas.

Perjalanan dinas diatur pada PMK Nomor 113/PMK/05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dijelaskan bahwa terdapat empat prinsip dalam perjalanan dinas yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu selektif berarti memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. Kedua, menyesuaikan anggaran yang ada dengan target kinerja Kementerian/Lembaga. Ketiga, turut memperhatikan dan mengelola anggaran dengan tujuan efisiensi penggunaan belanja negara. Dan yang keempat, pembiayaan pelaksanaan dinas harus akuntabilitas dalam pemberian perintah. Adapun uang harian, biaya transport, penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan/atau biaya untuk menjemput/mengantarkan jenazah merupakan komponen dari perjalanan dinas.

Pengeluaran kas untuk perjalanan dinas memiliki 2 metode yaitu metode langsung dan metode uang persediaan. Adapun kedua metode tersebut memiliki beberapa dokumen yang berbeda dalam proses pencairan dana untuk dibayarkan ke pihak yang berhak. Dalam melaksanakan perjalanan dinas dibutuhkan jasa pihak ketiga yang menyediakan semua kebutuhan komponen perjalanan dinas tersebut. Pengeluaran kas adalah kegiatan atau transaksi yang terjadi akibat adanya pembelian secara tunai maupun utang, dan dapat mengurangi saldo kas dan bank dari perusahaan atau instansi (Hirman & Pratama, 2018).

Perjalanan Dinas Jabatan yaitu dalam melaksanakan tugasnya dilakukan perjalanan dinas hingga melewati batas kota atau dalam kota menuju tempat kegiatan yang diselenggarakan (Hirman & Pratama, 2018). Pembayaran perjalanan dinas menggunakan metode Langsung (LS) dibayarkan secara langsung melalui transfer dari rekening negara ke pihak yang berhak, sebelum itu dilakukan perkaitan komitmen kepada pihak ketiga yaitu penyedia jasa, bendahara pengeluaran, atau pelaksana. Sedangkan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dengan metode Uang Persediaan (UP) bendahara memberikan uang muka kepada pelaksana.

Perjalanan dinas tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, tergantung dari seberapa besar, lama, dan banyaknya waktu dan rincian kegiatan yang dibutuhkan untuk satu kegiatan penyuluhan. Bukti-bukti dari realisasi anggaran juga perlu dipertanggung jawabkan oleh setiap satuan kerja. Menurut berita dari liputan6.com 11 juli 2022, Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu John Wempi Wetipo mengungkapkan bahwa kedepannya perjalanan dinas aparatur Negara tidak

akan lagi membawa uang tunai, sebagai langkah antisipasi kebocoran dana perjalanan (<https://www.liputan6.com>, 2022).

Melalui laman tersebut juga disebutkan tujuan dari perjalanan dinas tidak lagi memakai uang tunai adalah untuk mendorong digitalisasi agar bisa dilakukan yaitu dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Melalui hal tersebut kepatuhan terhadap prosedur pengeluaran kas meminimalisir terjadinya kebocoran dana perjalanan dinas dengan Surat Pertanggung Jawaban yang dilakukan semestinya.

Sesuai pernyataan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran kas terhadap perjalanan dinas di lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, penulis menyusun laporan tugas akhir yang berjudul “**Prosedur Pengeluaran Kas Terhadap Perjalanan Dinas Jabatan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar biaya untuk perjalanan dinas jabatan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional?
2. Bagaimana prosedur pembayaran dengan metode Langsung dan Uang persediaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional?
3. Bagaimana dokumen pengadaan untuk perjalanan dinas jabatan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional?

1.2.2 Pembatasan Permasalahan

Pembahasan permasalahan dibatasi hanya pada penerapan prosedur tentang pengeluaran kas terhadap Perjalanan Dinas Jabatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar biaya untuk perjalanan dinas jabatan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Untuk mengetahui prosedur pembayaran dengan metode Langsung dan Uang Persediaan.
3. Untuk mengetahui dokumen pengadaan untuk perjalanan dinas jabatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berikut manfaat dari penulisan laporan tugas akhir sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Membantu penulis mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan terkait prosedur pengeluaran kas lembaga pemerintah, mengembangkan *softskill* untuk penyusunan laporan dan keberanian dalam mengekspresikan opini pribadi.

b. Bagi Universitas

Mendapatkan informasi terkait prosedur pengeluaran kas di instansi pemerintahan, dan sebagai sarana untuk mengetahui seberapa tinggi pemahaman mahasiswa dalam penulisan laporan tugas akhir.

c. Bagi Instansi

Mendapatkan hubungan baik antar mahasiswa, universitas, dan instansi tersebut. Diharapkan hasil penulisan laporan ini dapat memberikan masukan dari penerapan prosedur pengeluaran kas di instansi pemerintahan.

1.4 Metode Penulisan

Untuk melakukan penulisan, berikut metode penulisan yang digunakan untuk memperoleh data dalam menyusun laporan tugas akhir, sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang sedang dipelajari yaitu pengeluaran kas yang bersumber dari jurnal dan buku, serta kebijakan prosedur pengeluaran kas bersumber dari peraturan pemerintah.

2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pengeluaran kas dengan mengajukan pertanyaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3. Observasi

Melakukan observasi dengan mengamati secara langsung setiap proses yang terjadi pada pengeluaran kas serta dengan dokumen terkait. Mulai dari proses perencanaan anggaran, dokumen pengadaan, serta pembayaran untuk perjalanan dinas.

4. Praktik kerja (Magang)

Praktik kerja dilakukan selama 3 (tiga) bulan dengan tujuan mengumpulkan informasi serta pemahaman terkait penerapan prosedur pengeluaran kas di Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2017). Sistem Pengendalian Internal Atas Fungsi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada P.T. Sarana Hachery Abadi. *Jurnal Economix*, 5(1), 167–175. file:///C:/Users/ACER/Downloads/5370-12902-1-SM (1).pdf.
Diakses pada tanggal 1 Agustus 2020
- Anna, A., Nurmalasari, N., & Yusnita, A. E. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Kantor Camat Pontianak Timur. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 6(2), 107–118. <https://doi.org/10.31294/khatulistiwa.v6i2.153>
- Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240. <https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240>
- Biduri, Sarwendah. 2018. Buku Ajaran Akuntansi Sektor Publik. Sidorarjo: UMSIDA Press.
- Bakari, R. I., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 941–948.
- Bastian, P. I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*.
- Hasanah, H., & Rudyanto, A. (2020). Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Equity*, 22(2), 215. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.932>

- Hirman, H., & Pratama, R. H. (2018). Analisis Sistem Informasi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 2(1), 77. <https://doi.org/10.35837/subs.v2i1.274>
- Kuangan, K. (2021). *Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN*.
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Mahfudin. (2018). *EFEKTIVITAS KEBIJAKAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM MENUNJANG KINERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Effectivity Of Travel Cost Standard Policy In Supporting Performance Of The Ministry Of State / Institution*. 2(2), 53–68.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012, Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
- Rondonuwu, G. C., Morasa, J., & Wokas, H. R. N. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 436–444.

<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20296.2018>

Siahaan, H. S. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam Mendukung Pengendalian Intern Kas Pada Perum BULOG Kanwil Sumut. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 226-240.

Spanos, P., & Liapis, K. (2018). International accounting standards, budgeting and controlling in private and public sektor. *Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the Changing World (Ebeec 2018)*, 2018, 107–130. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3533>

van Helden, J., & Reichard, C. (2019). Making sense of the users of public sektor accounting information and their needs. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31(4), 478–495. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0124>

Wijaya, D., & Irawan, R. (2018). *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat*. XVI(1), 40.

Yani, N. P. T. P., & Suputra, I. D. G. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1196. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p10>